**BAB II**

**KAJIAN TEORI**

1. **Konsep Dasar Kebijakan**
2. **Pengertian Kebijakan**

Secara Etimologi kebijakan diterjemahkan dari kata *policy* yang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah ataupun tindakan pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu. Kebijakan secara Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. “Wahab, berpendapat kebijakan sering dipertukarkan dengan tujuan, program, keputusan Undang-undang, ketentuan-ketentuan, rancangan-rancangan besar yang dikaitkan dengan keputusan pemerintah pada semua level dalam menyikapi suatu permasalahan atau isu yang terjadi dalam konteks atau lingkungan sistem politiknya.”[[1]](#footnote-2) Menurut Weihrich dan Koontz bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetapi dalam keterbatasan.

Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.[[2]](#footnote-3) Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering hanya diimplikasikan dari tindakan manajer[[3]](#footnote-4)

Istilah kebijakan publik secara umum dapat diartikan sebagai aturan dalam kehidupan bersama yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan publik berkenaan dengan hubungan antar warga maupun warga dengan pemerintah.

Sementara Koontz, Donnell dan Weihrich mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai tuntutan dalam berpikir untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan tidak memerlukan tindakan tetapi dimaksud untuk menuntun manajer dalam memutuskan komitemen.[[4]](#footnote-5) Lebih lanjut Mullins mengatakan bahwa kebijakan adalah ouline sikap atau aksi organisasi dan implementasi tujuan dan hasil, juga diartikan sebgai peraturan, rencana, dan prosedur yang berhubungan dengan semua aktivitas organisasi dan terhadap semua tingakatan organisasi.

Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan subtantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan subtantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan subtantif.[[5]](#footnote-6)

Defenisi kebijakan di atas memiliki makna berupa serangkaian keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan atau tindakan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan serangkaian persoalan untuk mencapai tujuan dalam kepentingan bersama.

Suatu kebijakan mempunyai makna yang luas. Oleh sebab itu, kebijakan mengatur tingkah laku seseorang atau organisasi dan kebijakan meliputi pelaksanaan serta evaluasi dari tindakan tersebut. Hasil dari evalasi tersebut, akan menentukan bobot serta validitas dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini kebijakan pendidikan telah kita lihat berkaitan dengan wilayah etika melihat kenyataan tindakan pendidikan sebagai suatu proses pemberdayaan peserta didik.

Kebijakan berarti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran atau garis haluan.[[6]](#footnote-7) Ali Imron mengemukakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah[[7]](#footnote-8). Hal tersebut searah dengan pendapat Les Bell dan Howard Stevenson bahwa “*Policy can also be though of as a position or stance developed in response to a problem or issue of conflict, and directed towords a particular objective”* yang artinya kebijakan dapat dianggap sebagai posisi atau sikap yang dikembangkan dalam menanggapi masalah atau isu konflik dan diarahkan menuju tujuan tertentu.[[8]](#footnote-9)

Kebijakan berdasarkan beberapa pendapat di atas mengandung makna kebijakan sebagai bentuk pengaplikasian dari cita-cita, tujuan organisasi untuk mencapai sebuah solusi dari masalah yang sedang dihadapi dan sebagai sikap yang ditujukan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas organisasi.

Sholichin Abdul Wahab mengartikan kebijakan sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang keompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan[[9]](#footnote-10). Kebijakan mengatur tingkah laku seseorang atau organisasi dan kebijakan meliputi pelaksanaan serta evaluasi dari tindakan tersebut. Hasil evaluasi tersebut akan menentukan bobot serta validitas dari kebijakan tersebut. Pendidikan merupakan suatu ilmu praksis yang berarti kesatuan teori dan paraktik. Maka kebijakan pembinaan terletak dalam tatanan normatif dan tatanan deskriptif.

Berkaitan dengan kebijakan pendidikan, Alisyahbana mendefenisikan kebijakan pendidikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor diluar pemerintah dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Tilaar memiliki anggapan bahwa pengertian kebijakan pendidikan dapat dilahirkan melalui kegiatan mengenai hakikat proses pendidikan itu sendiri. Artinya kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan hakikat pendidikan dalam proses memanusiakan manusia menjadi manusia merdeka. Sehingga kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu[[10]](#footnote-11).

Jadi kebijakan *(policy)* merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok orang dalam memecahkan suatu persoalan atau permasalahan. Pengertian ini lebih mendekati kebenaran, karena keputusan yang diambil harus memiliki agenda atau tujuan tertentu dan merupakan upaya pemecahan masalah yang ada di sebuah lembaga. Seorang pemimpin senantiasa harus berpedoman untuk pemenuhan visi dan misi lembaga dalam mengeluarkan sebuah kebijakan.

1. **Tingkat-tingkat Kebijakan**

a. Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek. kebijaksanaan nasional dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau Negara atas nama instansi yang dipimipinnya (Presiden , Menteri, Gubernur, Sekjen dan seterusnya) dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan, guna mengatasi pembangunan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk keputusan formal. Kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengandung arti: (1) hasil produk keputusan yang diambil dari komitmen bersama, (2) adanya formulasi, (3) pelaksanaannya adalah orang-orang dalam organisasi, (4) adanya prilaku yang konsisten bagi para pengambil keputusan.[[11]](#footnote-12)

Sedangkan pengertian *policy* menurut perserikatan bangsa –bangsa adalah pedoman untuk bertindak, meliputi pedoman yang bersifat sederhana sampai dengan yang kompleks, bersufat umum atau khusus, berdasarkan luas maupun sempit, transparan maupun kabur(tidak jelas), terinci maupun global.[[12]](#footnote-13)

Dengan demikian, pengertian kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dengan diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu baik bersifat militer dan non militer, dengan memproyeksikan program – program.

Kebijakan diartikan sebagai konsep dan asas yang dijadikan sebagai garis besar dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaaan,kepemimpinan dan cara bertindak(Berhubungan dengan keorganisasian dan pemerintahan); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran[[13]](#footnote-14)

Dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Kebijakan Publik dalam pemahaman mereka adalah Peraturaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah,dan hanya Pemerintah (Pusat/daerah) yang dapat melakukakanya.Dalam hal ini yang melaksanakan Kebijakan Publik tersebut adalah warga negara dan pemerintahan yang mengaturnya,terlepas dari realitas apakah Kebijakan Publik seideal artinya (Mensejahterakan Publik) atau tidak.Dan yang membuat Kebijakan Publik mengikat adalah karena ia memiliki landasan hukum,karena Kebijakan Publik bisa juga disebut sebagai salah satu turunan Undang-undang.Di Indonesia Perundang-undangan mempunyai hierarki sebagai berikut seperti diatur dalam UU No. 12/2011 (yang menggantikan UU No. 10/2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b.   Kebijakan Umum

Kebijakan Umum menurut pendapat Said Zainal Abidin dalam Dedy Mulyadi, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Kebijakan umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan, baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negative, yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Kebijakan Umum Kebijakan umum adalah kebijakan Presiden sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR, UU, untuk mencapai tujuan nasional. Presiden berwenang menetapkan kebijakan umum. Kebijakan umum yang tertulis dapat berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden.[[14]](#footnote-15)

Kebijakan umum ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah tersebut yaitu: 1) adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat; 2) adanya output kebijakan, di mana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat; 3) adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyrakat.

c.  Kebijakan Teknis

Kebijakan teknis menurut pendapat Said Zainal Abidin dalam Dedy Mulyadi, adalah kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakanpelaksanaanKebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. [[15]](#footnote-16) Analisis Kebijakan (*Policy* *Analysis*) dalam arti historis yang paling luas merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan.

Bedasarkan penjelasan beberapa defenisi terkait kebijakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi system pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka penjang dan menyeluruh.

1. Tahapan Pembuatan Kebijakan

Tahapan kebijakan adalah rangkaian [konsep](http://id.wikipedia.org/wiki/Konsep) dan asas yang menjadi [pedoman](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedoman&action=edit&redlink=1) dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada [pemerintahan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan), [organisasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi) dan kelompok sektor swasta, serta [individu](http://id.wikipedia.org/wiki/Individu). Kebijakan berbeda dengan [peraturan](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan&action=edit&redlink=1) dan [hukum](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum). Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu [perilaku](http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku) (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran [pajak penghasilan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan)), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Tahap-tahap Kebijakan. Seperti yang dikemukakan Dunn Beliau berpendapat bahwa metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, evaluasi dan Implementasi.[[16]](#footnote-17). Dalam analisis kebijakan prosedur-prosedur tersebut memperoleh nama-nama khusus, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan, dan penilaian/evaluasi kebijakan.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Dunn dalam pembuatan kebijakan melibatkan empat tahapan yang semuanya saling terhubung dan terkait. Ilustrasi elemen kebijakan digambarkan di bawah ini:

Gambar Proses Penetapan Kebijakan

Penyusunan agenda

Formulasi kebijakan

Adopsi/ legitimasi

Penilaian/evaluasi

Proses Kebijakan Pengembangan Masalah

Untuk Mencapai Target

Dunn dalam pembuatan kebijakan tahap-tahap yang dilaluinya adalah :

1. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.[[17]](#footnote-18)

1. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing slternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.[[18]](#footnote-19)

1. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah.Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi – cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.[[19]](#footnote-20)

1. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.[[20]](#footnote-21)

Sebuah kebijakan identik dengan sebuah keputusan, adapun keputusan itu sendiri dapat diartikan suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan – kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya.Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini. Itu semua bermula ketika kita perlu untuk melakukan sesuatu tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pembuatan kebijakan merupakan suatu proses yang melibatkan banyak komponen ataupun variable yang harus dikaji. Para ahli membagi proses-proses penyusunan kebijakan kedalam beberapa tahapan. Namun, beberapa nilai dalam pembagian tahap-tahap ini terdapat perbedaan anatara satu dengan yang lain sesuai dengan perspektif masing-masing.

Yoyon Bachtiar Irianto mengemukakan empat elemen yang saling berkaitan dalam pembuatan kebijakan, yaitu : 1) Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi; 2) Isu kebijakan itu sendiri termasuk didalamnya maksud dan tujuan kebijakan; 3) Perumusan masalah dan alat yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut; 4) Akibat yang terjadi baik yang sesuai dengan lingkungan disekitarnya ataupun tidak[[21]](#footnote-22).

Kebijakan pendidikan dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik dibidang pendidikan. Dengan demikian kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik. Maka proses dalam pembuatan kebijakan pendidikan tidak jauh berbeda dengan kebijakan publik, bahkan bisa dianggap sama. Terbentuknya kebijakan meliputi beberpa aspek inti (isu kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan) dan pada setiap aspek memiliki teori sendiri. Dengan kata lain bahwa proses kebijakan adalah tahap gagasan kebijakan, formulasi dan legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, baru kemudian menuju kepada kinerja atau mencapai prestasi yang diharapkan.

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman bertindak, pembatas perilaku dan bantuan bagi pengambil keputusan.

Pada dasarnya indikator kinerja untuk menilai derajat pencapaian standar dan sasaran kebijakan dapat dijelaskan bahwa kegiatan itu melangkah dari tingkat kebijakan yang masih berupa dokumen peraturan menuju penentuan standar spesifik dan kongkrit dalam menilai kinerja program. Dengan standar dan sasaran dapat diketahui seberapa besar keberhasilan program yang telah dicapai.

1. **Implementasi Kebijakan Dalam Pembinaan Akhlak**
2. Pengertian Implementasi

Makna implementasi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan sedangkan mengimplemntasikan adalah melaksanakan atau menerapkan.[[22]](#footnote-23) Implementasi merupakan suatu proses penerapan, ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap.[[23]](#footnote-24) Dalam *Oxford Advance Learner’s Dictionary* (OALD) dikemukakan bahwa implementasi adalah “*Put something into effect*” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak)

Sejalan dengan pengertian diatas, Miller dan Seller mengungkapkan sebagai mana dikutip Mulyasa bahwa “Implementasi juga diartikan sebagai aktualisasi, proses penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kegiatan kedalam paraktik pembelajaran atau aktifitas-aktifitas baru sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah”.[[24]](#footnote-25) Dari pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa implementasi sebagai proses penerapan ide, kebijakan dalam suatu proses dalam aktivitas pendidikan.

“Menurut Parsons, implementasi adalah sesuatu yang melibatkan pengakuan bahwa organisasi mengandung keterbatasan manusia dan organisasional, dan bahwa manusia dan organisasi itu harus dianggap sebagai sumber daya. Implementasi yang efektif adalah sebuah kondisi yang dapat dibangun dari pengetahuan dan pengalaman dari orang-orang yang ada di garis depan pemberian layanan.”[[25]](#footnote-26)

Berikutnya Merile Grindle yang dikutip Budi Winarno memandang secara umum bahwa sebuah implementasi bertujuan membentuk suatu ikatan yang mudah merealisasikan tujuan sebagai dampak dari kegiatan. Tugas implementasi mencakup terbentuknya sistem pencapaian sebuah kebijakan, dimana melalui kebijakan ini sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan akan sampai kepada tujuan yang diinginkan.[[26]](#footnote-27)

Dengan demikian implementasi yang sukses membutuhkan sistem yang baik, sebagaimana dinyatakan oleh Nugroho bahwa sebuah sistem implementasi yang sukses melibatkan empat tipe control yang efektif yaitu : 1) Koordinasi melampaui waktu artinya mekanisme kontrol dilakukan tidak hanya terikat pada jam kerja melainkan koordinasi secara optimal dan informal., 2) Koordinasi pada waktu tertentu artinya kontrol perlu terjadwal dan diketahui oleh kedua belah pihak secara koordinsi., 3) Logistik mendetail dan penjadwalan artinya unsure pendukung proses kontrol harus tersedia secara memadai dan tepat guna., dan 4) Pertambahan batas-batas struktural artinya kewenangan tugas dan tanggung jawab pada setiap unsure organisasi harus jelas sehingga mekanisme control mudah diterapkan.[[27]](#footnote-28)

Implementasi membutuhkan sebuah sistem yang teratur dengan baik dari setiap langkah-langkah dalam proses pencapaian tujuan dari implementasi, dari proses pengimlemtasian perlu untuk melakukan beberapa kontrol diantaranya ialah kontrol waktu untuk pencapaian dari target yang telah ditetapkan.

Seperti yang dinyatakan Parsons yang diterjemahkan oleh Robert menyebutkan terdapat 4 (empat) factor yang memepengaruhi impelementasi yaitu: 1) Merumuskan tujuan dan menentukan rencana. 2) Memonitor rencana tersebut. 3) Menganalisis apa yang telah terjadi berkenaan dengan apa yang sebenarnya. 4) Mengimplementasikan perubahan supaya dapat meminimalisir kegagalan untuk merealisasikan suatu tujuan.[[28]](#footnote-29)

Implementasi yang terorganisir memiliki perencanaan yang baik dan diketahui oleh seluruh anggota lembaga, sehingga seluruh anggota organisasi dapat melakukan pengecekan atas setiap proses yang dilakukan, mengetahui kelemahan dari proses yang dilakukan sehingga pengimplementasian dapat dilakukan dengan meminimalisir kegagalan

Implementasi merupakan suatu proses penerapan, pelaksanaan ide, konsep, dan kebijakan program atau tatanan kegagalan kedalam paraktik manajemen.

Menurut Parson *“Quality is an evaluation of tehe process of educating which enhances the need to achieve and develop the talents of customers of the process, and at the same time meets the accountability standars set by the clients who pay for the process or the outputs from the process of the educating*”.[[29]](#footnote-30)

Berdasakan pengertian dan pendapat yang dikemukan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri, merupakan suatu proses penerapan, pelaksanaan ide, konsep dan kebijakan program atau tatanan kegiatan kedalam paraktik manajemen didalam satu organisasi serta aktivitas-aktivitas baru, Implementasi dipengaruhi oleh keputusan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai suatu pelaksanaan kegiatan dan diharapkan dapat mengatasi suatu masalah, tujuan yang akan dicapai dan cara untuk memecahkannya dan Implementasi menjadi suatu kesalahan besar jika yang dilaksanakan dengan yang dirancang tidak sesuai dengan rancangan maka implementasi tidak berjalan lancar atau dalam masalah besar dan bisa dikatakan gagal.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Implementasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan, kerena hal tersebut merupakan tindak lanjut dari sebuah kebijakan. Adapun yang menjadi fakto-faktor yang mempengaruhi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi *(Comunication)*; faktor komunikasi dianggap penting karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsure sumber daya manusia akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”
2. Ketersedian sumber daya *(Resourse);* berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu kaitannya dengan sumber daya manusia, informasi, kewenangan, srana dan prasarana serta pendanaan.
3. Sikap dan komitmen dari pelaksanaan program *(disposition)* yang berhubungan dengan ketersediaan implementor untuk menyelesaikan kebijakan public tersebut.
4. Struktur birokrasi *(bureaucratic structure)*; menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkan rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.[[30]](#footnote-31)

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan yang disebutkan di atas dapat diidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari kumpulan faktor tersebut dapat diketahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi diantaranya kebijakan yang kontennya setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut yaitu jelas, tidak distortif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumber daya baik manusia maupun financial yang baik.

Implementator dan kelompok target. Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan *(implementator)* dan kelompok target *(target groups).* [[31]](#footnote-32) Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen, dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan, selain itu kelompok target yang terdidik dan relatif homogeny sehingga lebih mudah menerima sebuah kebijakan daripada kelompok yang tertutup, tradisonal dan heterogen. Lebih lanjut, kelompok target yang merupakan bagian dari populasi juga akan lebih mempersulit keberhasilan implementasi kebijakan.

1. **Konsep Pembinaan Akhlak**

1. Hakekat Pembinaan Akhlak

Pembinaan akhlak bagi setiap muslim merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan terus menerus tanpa henti baik melalui pembinaan dari orang lain maupun pembinaan yang dilakukan atas dirinya sendiri tanpa harus dituntun oleh orang lain. karena dari situ sebuah proses perubahan tersebut di mulai.

1. Pembinaan Rohani

Dengan adanya pembinaan rohani, maka anak dapat mengetahui kewajibannya kepada Allah dan Rasul-Nya, orang tuanya dan masyarakat. Pembinaan rohani dapat meliputi :

1. Pendidikan iman

Iman secara etimologi berarti kepercayaan, sedang secara definitif adalah suatu kepercayaan yang menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang menciptakan, memberi hukuman-hukuman, mengatur dan mendidik alam semesta ini (Tauhid Rububiyah), sebagai konsekuensinya maka hanya Tuhan itulah yang satu-satunya yang wajib disembah, dimohon petunjuk dan pertolongan-Nya serta yang harus ditakuti (Tauhid Uluhiyah).[[32]](#footnote-33) Dengan kata lain Tauhid Uluhiyah ialah percaya sepenuhnya, bahwa Allah-lah yang berhak menerima semua peribadatan makhluk, dan hanya Allah sajalah yang sebenarnya dan yang harus disembah.

1. Pendidikan ibadah

Secara umum ibadah berarti bakti manusia kepada Allah SWT karena didorong dan dibangkitkan oleh aqidah tauhid.[[33]](#footnote-34)

Materi pendidikan ibadah secara menyeluruh telah dikemas oleh para ulama di dalam ilmu fiqih atau fiqih Islam. Pendidikan ini tidak hanya membicarakan tentang hukum dan tata cara sholat belaka, melainkan meliputi pembahasan tentang zakat, puasa, haji, tata ekonomi Islam (muamalat), hukum waris (faroidh), tata pernikahan (munakahat), tata hukum pidana (jinayat/hudud), tata peperangan (jihad), makanan sampai dengan tata negara (khilafah). Hal ini dimaksudkan agar mereka tumbuh menjadi insan-insan yang benar-benar takwa, yakni insan-insan yang taat melaksanakan segala perintah agama dan taat pula dalam menjauhi segala larangan-Nya. Dengan kata lain tujuan pendidikan adalah agar hidup anak sejalan dengan tuntunan syariat Islam.[[34]](#footnote-35)

Pendidikan ibadah merupakan proses membimbing dan mengarahkan segala potensi insan (manusia) yang ada pada anak terutama potensi kehambaan pada Allah, sehingga akan menimbulkan ketaatan yang tertanam kuat dalam hati sebagai pegangan dan landasan hidup di dunia dan di akherat. Sehingga dengan pendidikan ibadah tersebut seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku didasari atas ketaatan kepada Allah.

1. Pendidikan Akhlak

Kiranya tidak diragukan lagi bahwa keutamaan akhlak dan tingkah laku merupakan salah satu buah iman yang meresap dalam kehidupan keberagamaan anak. Maka seorang anak bila sejak dini tumbuh dan berkembang dengan dasar iman kepada Allah, niscaya anak akan mempunyai kemampuan untuk menerima setiap keutamaan dan kemudian ia akan terbiasa dengan akhlak yang mulia karena ia menyadari bahwa iman akan membentengi dirinya dari berbuat dosa dan kebiasaan jelek.[[35]](#footnote-36)

Maka dalam rangka mendidik akhlak kepada anak-anak selain harus memberikan keteladanan yang tepat juga harus ditunjukkan bagaimana harus bersikap, bagaimana harus menghormati dan seterusnya. Dengan adanya pendidikan akhlak diharapkan anak-anaknya mempunyai akhlakul karimah yang baik.[[36]](#footnote-37)

Dengan kata lain, esensi dari pendidikan akhlak adalah melahirkan manusia yang berpribadi muslim yang taat terhadap hukum dan ketetapan syari’ah Islam. Jika akhlak diartikan seperti pemahaman Ibnu Miskawih yang menekankan bahwa akhlak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan, maka pendidikan akhlak menjadi upaya melahirkan manusia berpribadi muslim yang mudah untuk melaksanakan ketentuan hukum dan ketetapan syari’ah agama, dan sikap taat tersebut selalu menjadi sifatnya ketika berhadapan dengan ketentuan agama, tanpa banyak alasan untuk tidak melaksanakannya.

1. Pendidika kemandirian

Kemandirian adalah bentuk sikap terhadap obyek di mana individu memiliki independensi yang tidak berpengaruh terhadap orang lain[[37]](#footnote-38)

Perilaku mandiri dapat tumbuh dan berkembang pada diri anak melalui pembiasaan dan ajaran masing-masing orang tua yang memiliki peran yang lebih dominan dalam membentuk sikap mandiri pada anak. Perilaku mandiri yang tumbuh dan berkembang pada diri anak dipengaruhi oleh beberapa faktor dari dalam yang berupa kematangan dan intelegensi anak juga berpengaruh terhadap kemandirian anak. Namun faktor dari dalam yang sangat menentukan kemandirian anak adalah kekuatan iman dan ketakwaan terhadap Allah SWT. Anak yang memiliki kepercayaan dan keyakinan yang kuat terhadap agama cenderung memiliki sikap mandiri yang kuat.[[38]](#footnote-39)

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan melepaskan diri dari ketergantungan emosi pada orang lain terutama orangtua, mampu mengambil keputusan dan berkomitmen pada keputusan yang diambil, serta mampu bertingkah laku sesuai dengan nilai dan ajaran Islam yang diyakini dan berlaku pada lingkungan.

1. Pembinaan Akhlak

Pembinaan akhlak tidak kalah pentingnya dari pembinaan lain. Pendidikan agama merupakan pembentuk dasar pendidikan jasmani sebagai persiapan pendidikan moral untuk membentuk akhlak, sedangkan pendidikan akal untuk penyadaran dan pembudayaan. Yang dimaksud dengan pendidikan akal adalah membentuk pemikiran anak dengan sesuatu yang bermanfaat seperti ilmu pasti, ilmu alam, teknologi modern dan peradaban sehingga anak bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan akhlak merupakan satu kesatuan dari pendidikan yang telah disebutkan. Terdapat saling keterkaitan antara aspek-aspek pendidikan itu untuk membentuk akhlak menjadi pribadi yang utuh yang dapat mengemban kewajiban dan tanggung jawab sebagai manusia dan khalifah Allah di muka bumi. [[39]](#footnote-40)

Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut Islam telah memberikan petunjuk diantaranya memberikan beberapa kelebihan pada orang-orang yang berilmu pengetahuan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al Mujadilah : 11 yaitu :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١

*Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu : berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangknalah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berupa derajat”.[[40]](#footnote-41)*

Dari uraian di atas jelas bahwa pembinaan akhlak melalui pendidikan ini sepadan dengan pembinaan intelektual anak, yaitu usaha untuk menjadikan anak untuk mencintai ilmu sehingga anak akan termotivasi untuk mempelajari sesuatu untuk memperoleh kebenaran.

1. Pembinaan jasmani

Pendidikan jasmani adalah salah satu aspek pendidikan yang penting, yang tidak dapat lepas dari pendidikan yang lain bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan jasmani merupakan salah satu alat utama bagi pendidikan rohani. Pendidikan jasmani di sini maksudnya adalah pendidikan yang erat kaitannya dengan pertumbuhan dan kesehatan. Agar jasmani menjadi sehat dan kuat maka dianjurkan untuk melakukan olah raga.[[41]](#footnote-42)

pendidikan jasmani adalah segala rupa pendidikan yang menyuburkan dan menyehatkan tubuh serta menegakkannya, supaya dapat merintangi kesukaran yang dihadapi dalam pengalamannya. Keselamatan tubuh dan kesehatan sangat mempengaruhi pekerjaan, baik akal maupun anggota tubuh (jism).

Jasmani bukanlah lantaran untuk mencari ataupun mendapatkan manfaat perkara yang dicari akal ataupun perkara-perkara yang lain, akan tetapi ia merupakan syarat dasar untuk kesehatan akal pada dirinya. Sehat pekerjaan akal itu harus seimbang dengan pekerjaan jasmani, karena sehat dalam pandangan agama bukan hanya bebas dari penyakit atau sakit cacat jasmani, akan tetapi juga rohani. Islam memperkenalkan istilah “afiat” yang pada hakikatnya adalah berfungsinya seluruh potensi jasmani dan rohani manusia sehingga mampu mencapai tujuan kehadirannya di pentas bumi ini.

Dengan kesehatan baik jasmani dan rohani kualitas hidup dan pengabdiannya menjadi meningkat, dan janganlah ragu-ragu bahwasannya akal yang selamat terdapat dalam jism yang selamat

**2. Tujuan Pembinaan Akhlak**

Akhlaq dalam ajaran agama tidak dapat disamakan dengan etika, jika etika didasari pada sopan santun antar sesama manusia, serta hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriah. Akhlak lebih luas maknanya dari sekedar sifat lahiriah yang berkaitan dengan sikap batin maupun pikiran. Akhlak diniah (agama) mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah, hingga kepada sesama makhluk (manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa).

1. Akhlak kepada Allah

Titik tolak akhlak terhadap Allah atau pengukuran dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji, demikian agung sifat terpuji itu, yang jangankan manusia, malaikat pun tidak akan mampu menjunjungkan hakikatnya

1. Akhlak terhadap sesama manusia

Banyak sekali rincian yang dikemukakan Al-Qur’an berkaitan dengan perlakuan terhadap sesama manusia. Petunjuk mengenai hal ini bukan hanya dalam bentuk larangan melakukan hal-hal negatif seperti membunuh, menyakiti badan, atau mengambil harta dengan jalan menceritakan aib seseorang dibelakangnya, tidak peduli aib itu benar atau salah, walaupun sambil memberikan materi kepada yang disakiti hatinya itu.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al Mujadilah : 263 yaitu :

قَوۡلٞ مَّعۡرُوفٞ وَمَغۡفِرَةٌ خَيۡرٞ مِّن صَدَقَةٖ يَتۡبَعُهَآ أَذٗىۗ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٞ

Terjemahnya :

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun”[[42]](#footnote-43)

1. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak Islami**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak pada khususnya dan pendidikan pada umumnya menurut Umar Tirtarahardja ada tiga aliran yang sudah amat populer. Pertama aliran Nativisme. Kedua, aliran Empirisme, dan ketiga aliaran Konvergensi.[[43]](#footnote-44)

1. Nativisme

Nativisme aliran ini dipelopori oleh seorang bangsa Jerman bernama Arthur Schopenhauer yang hidup pada abad 19, menurut aliran ini faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan akhlak seseorang adalah faktor pembawaan dapat berupa kecenderungan, bakat, akal. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik, begitu juga sebaliknya.

Aliran ini tampaknya begitu yakin terhadap potensi batin yang ada dalam diri manusia, dan hal ini erat kaitannya dengan pendapat aliran intuisisme dalam penentuan baik dan buruk. Namun dalam aliran ini tampaknya kurang menghargai peran pembinaan dan pendidikan.

1. Empirisme

Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang lahir di Inggris dan dipelopori oleh David Hume, George Barkeley dan Jhon Locke. menurut aliran ini faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan akhlak seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkunagn sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pendidikan dan pembinaan yang diberikan itu baik, maka orang itu akan menjadi baik, begitu pula sebaliknya. [[44]](#footnote-45) Aliran ini lebih percaya kepada peranan pembinaan dan pendidikan yang diberikan dengan kata lain aliran ini memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengenalan lahir maupun pengenalan batiniyah.

1. Konvergensi

Aliran Konvergensi dipelopori oleh William Stern menganggap bahwa seorang anak dilahirkan sudah disertai pembawaan baik dan buruk.[[45]](#footnote-46) Menurut aliran ini berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak seseorang adalah faktor internal, yaitu pembawaan seseorang dan disertai dengan faktor eksternal, yaitu pembinaan, pendidikan, dan interaksi dalam lingkungan sosial.

Aliran konvergensi ini tampaknya yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dipahami dari ayat al-Qur’an berikut. (QS. An-Nahl :78)

وَٱللَّهُ أَخۡرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ شَيۡ‍ٔٗا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفۡ‍ِٔدَةَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٧٨

Terjemahnya:

“*Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pengajaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur*.” [[46]](#footnote-47)

Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa manuasia memilki potensi untuk dididik, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati. Potensi tersebut harus disyukuri denagn ajaran dan pendidikan.

Kesesuaian teori konvergensi ini juga sejalan dengan hadis Nabi saw. yang berbunyi:

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى االْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَا نِهِ اَوْ يُنَصِّرَا نِهِ اَوْ يُمَجِّسَا نِهِ (رواه االبخا رى)

Artinya:

Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan (membawa) fithrah (rasa ketuhanan dan kecenderungan kepada kebenaran), maka kedua orang tuanyalah yang membentuk anak menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. (HR. Bukhari)[[47]](#footnote-48)

Dengan demikan faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak manusia ada dua, yaitu faktor dari dalam diri yaitu potensi fisik, intelektual, serta hati nurani yang dibawanya sejak lahir, dan faktor dari luar yaitu pembinaan, pendidikan, serta interaksi dengan lingkungan sosial.

**4. Strategi Pembinaan Akhlak Islami**

Yang di maksud dengan strategi di sini adalah teknik, ilmu yang menggunakan sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang, rencana langkah-langkah yang di lakukan secara sistematis dalam perang. Perang yang dimaksud disini adalah peperangan seorang guru untuk membina murid-muridnya agar menjadi anak yang berakhlak.

a. Strategi Pembinaan Secara Lengsung

Menurut Marimba[[48]](#footnote-49) dalam bukunya yang berjudul ”PengantarFilsafat Pendidikan Islam” ditulis bahwa pendidikan secara langsungini terdiri dari lima macam yakni:

1). Teladan

Disini guru sebagai teladan bagi anak didiknya dalamlingkungan sekolah disamping orang tua dirumah. Guru hendaknyamenjaga dengan baik perbuatan maupun ucapan sehingga nalurianak yang suka meniru dan mencontoh dengan sendirinya akanturut mengerjakan apa yang disarankan baik itu orang maupun guru.

Sebagaimana pendapat salah seorang tokoh psikologi terapiyang sesuai dengan ajaran Islam ”si anak yang mendengar orangtuanya mengucapkan asma Allah, dan sering melihat orang tuanyaatau semua orang yang dikenal menjalankan ibadah, maka yangdemikian itu merupakan bibit dalam pembinaan jiwa anak”

2). Anjuran

Anjuran yaitu saran atau ajakan untuk berbuat ataumelakukan sesuatu yang berguna. Dengan adanya anjuranmenanamkan kedisiplinan pada anak didik sehingga akhirnya akan menjalankan segala sesuatu dengan disiplin sehingga akanmembentuk suatu kepribadian yang baik.

3). Latihan

Tujuan dari latihan adalah untuk menguasai gerakanhafalan dan ucapan-ucapan (pengetahuan). Dalam melakukanibadah kesempurnaan gerakan ucapan. Dengan adanya latihan inidiharapkan bisa tertanamkan dalam hati atau jiwa mereka.

4). Kompetensi

Kompetensi adalah persaingan meliputi hasil yang dicapaioleh siswa. Dengan adanya kompetensi ini para siswa akanterdorong atau lebih giat lagi dalam usahanya.

Misalnya guru mendorong anak untuk berusaha lebih giatdalam beribadah. Kompetensi menumbuhkan rasa kebersamaandan menanamkan rasa saling percaya.

5). Pembiasaan

Strategi ini mempunyai peranan yang penting dalampembentukan dan pembinaan Akhlakyang baik. Karena dalam pembiasaan ini menjadi tumbuh dan berkembang denganbaik dan tentunya dengan pembiasaan-pembiasaan yang harusdilakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga muncul suaturutinitas yang baik yang tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Dengan adanya uraian diatas, masalah strategi dan metodepembinaan akhlak atau pelaksanaannya bagi guru maupun orang tuamempunyai pengaruh yang penting dalam pelaksanaan pembinaanAkhlaksiswa.Menerapkan Akhlak dalam kehidupan sehari-hari,terutama nagi para pendidik amat penting, sebab penampilan, perkataan,akhlak, dan apa saja yang terdapat padanya, dilihat, didengar dandiketahui oleh para anak didik, akan mereka serap dan tiru, dan lebihjauh akan mempengaruhi pembentukan dan pembinaan akhlak mereka.

b. Pembinaan Lingkungan

Strategi dalam pembinaan lingkungan kampus berakhlak Islami, dalam praktik keseharian di lingkungan kampus, nilai-nilai keagamaan yang telah disepakati tersebut diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku warga kampus khususnya para mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari.

Strategi dan proses mengembangkan lingkungan kampus berakhlak Islami tersebut, menurut Muhaimin, mengemukakan bahwa strategi pengembangan akhlak Islami dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: pertama, sosialisasi nilai-nilai agama yang disepakati sebagai sikap dan perilaku ideal yang ingin dicapai pada masa mendatang di kampus, kedua, penetapan action plan mingguan atau bulanan sebagai tahapan dan langkah sistematis yang akan dilakukan oleh semua pihak di kampus dalam mewujudkan nilai-nilai agama yang telah disepakati tersebut, dan ketiga, pemberian penghargaan terhadap prestasi warga kampus, seperti dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa sebagai usaha pembiasaan (habit formation) yang menjunjung sikap dan perilaku yang komitmen dan loyal terhadap ajaran dan nilai-nilai agama yang disepakati. Penghargaan tidak selalu berarti materi (ekonomis), melainkan juga dalam arti sosial, kultural, psikologik, ataupun lainnya[[49]](#footnote-50)

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya yang membentuk kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan di lingkungan kehidupannya sehari-hari. Agama merupakan suatu sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, dapat membentuk corak dan dinamika kehidupan bermasyarakat, karena agama merupakan sumber inspirasi, penggerak dan juga berperan sebagai pengontrol bagi kelangsungan dan ketentraman hidup manusia dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai makhluk sosial, maka nilai-nilai agama yang dianut sangat dibutuhkan.

c**.** Pembinaan Lingkungan berwawasan Islami

Lingkungan berwawasan Islami di kampus menjadi harapan kampus yang mayoritas mahasiswanya menganut agama Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga pendidikan di kampus merupakan salah satu wahana yang sangat efektif untuk mencapai tujuan pendidikan, dengan alasan melalui proses pendidikan di kampus mahasiswa akan memperoleh bukan saja aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sikap[[50]](#footnote-51).

Mengembangkan konsep lingkungan kampus berwawasan Islami atau mengembangkan budaya religius adalah sekumpulan nilai-nilai agama yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang diimplementasikan oleh direktur, dosen, staf, mahasiswa, dan masyarakat kampus[[51]](#footnote-52). Tujuan utama pengembangan lingkungan kampus berwawasan Islami ialah keberagamaan mahasiswa itu sendiri, bukan terutama pada pemahaman tentang agama. Dalam hal ini, yang diutamakan pendidikan agama (Islam) dalam mengembangkan lingkungan berwawasan islami bukan hanya dari aspek knowing (mengetahui tentang ajaran dan nilai-nilai agama) ataupun doing (bisa mempraktikan apa yang diketahui) setelah diajarkannya di kampus, justru lebih mengutamakan being-nya (beragama atau menjalani hidup atas dasar ajaran dan nilai-nilai agama). Karena itu, pendidikan agama Islam harus lebih diorientasikan pada tataran moral action, yakni agar mahasiswa tidak hanya berhenti pada tataran kompeten (competence), tetapi sampai memiliki kemauan (will), dan kebiasaan (habit) dalam mewujudkan ajaran dan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari[[52]](#footnote-53).

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembinaan akhlak Islami mahasiswa yakni menciptakan lingkungan berwawasan islami. Dengan menumbuhkan suasana yang Islami melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh direktur, maka tidak menutup kemungkinan civitas akademik juga menjadi bagian dari aktor-aktor dalam menumbuh kembangkan suasana lingkungan berwawasan Islami.

Adapun konsep pengembangan lingkungan berwawasan islami meliputi :

1. Penciptaan suasana religius merupakan upaya untuk mengkondisikan suasana kampus dengan nilai-nilai dan perilaku religius (Islami). Hal ini dapat dilakukan dengan (a) kepemimpinan, (b) skenario penciptaan suasna religius, (c) tempat ibadah (musholla/masjid), (d) dukungan warga masyarakat[[53]](#footnote-54)

Penciptaan suasana religius sesungguhnya adalah pembudayaan atau pembiasaan nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam lingkungan kampus. Karena pembiasaan yang didukung oleh kebijakan dan sarana ibadah mempengaruhi dan menciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan secara optimal.

1. Internalisasi nilai dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai agama kepada para mahasiswa, terutama tentang tanggung jawab manusia sebagai pemimpin (khalifah) yang harus arif dan bijaksana. Internalisasi nilai suatu proses menanamkan dan menumbuh kembangkan suatu nilai atau budaya menjadi bagian diri orang yang bersangkutan. Penanaman dan menumbuhkembangkan nilai tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pengajaran. Internalisasi nilai, dapat dirumuskan secara bersama nilai-nilai agama yang disepakati dan perlu dikembangkan dalam lingkungan kampus untuk selanjutnya dibangun komitmen bersama diantara semua warga kampus khususnya para mahasiswa terhadap pengembangan nilai-nilai yang telah disepakati. Nilai-nilai tersebut ada bersifat vertikal dan horizontal[[54]](#footnote-55)

Internalisasi diartikan sebagai suatu jenis proses belajar di mana manusia-manusia atau hal-hal tertentu menjadi perangsang bagi seseorang untuk mengamalkan dan menghayati nilai-nilai tertentu di mana seseorang merasa puas sebab mengerjakan pekerjaan itu dan merasa risau atau tidak enak bila tidak mengerjakan pekerjaan itu.

1. Keteladanan. Anak dalam pertumbuhan memerlukan contoh. Dalam Islam percontohan yang diperlukan itu disebut *uswah hasanah* atau keteladanan. Berkait dengan keteladanan ini, persoalan yang biasanya muncul adalah tidak adanya keteladanan atau disebut krisis keteladanan, suri tauladan yang jumlahnya banyak justru saling kontradiktif. Anak juga tidak akan tumbuh secara wajar jika terdapat berbagai contoh perilaku yang saling bertentangan[[55]](#footnote-56).

Keperibadian Direktur dalam memimpin sangat dibutuhkan mahasiswa dalam rangka mengembangkan lingkungan yang berwawasan Islami melalui keteladanan

sebagaimana firman Allah SWT

لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ٢١

Terjemahnya:

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab: 21)

Keteladanan merupakan perilaku yang memberikan contoh kepada orang lain dalam hal kebaikan. Rasulullah SAW sendiri sebagai Nabi dan pemimpin diutus ke dunia tidak lain adalah menyempurnakan akhlak, dengan memberikan contoh pribadi beliau sendiri kepada umat manusia. Selain keteladanan, dalam mengembangkan lingkungan kampus yang islami juga dibutuhkan pembiasaan. Imam Suprayoga,[[56]](#footnote-57) lebih lanjut menjelaskan bahwa secara sosiologis perilaku seseorang tidak lebih dari pembiasaan saja, Membentuk sikap dan perilaku. Pembentukan sikap dan perilaku mahasiswa berarti proses menanamkan dan menumbuhkembangkan suatu nilai atau budaya menjadi bagian diri orang yang bersangkutan. Penanaman dan penumbuhkembangkan nilai tersebut dilakukan melalui berbagai teknik dan metode pendidikan dan pengajaran.[[57]](#footnote-58) Seperti pendidikan, pengarahan, nasehat, pencerahan dan lain sebagainya sehingga dengan itu dapat membentuk pola pikir, sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam.

1. **Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan sebagai pembanding adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Rini Setyaningsih (2017) Tesis.[[58]](#footnote-59) Dengan judul kebijakan internalisasi nilai-nilai islam dalam pembentukan kultur religius mahasiswa. Hasil peneliitian menunjukkan Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala lembaga atau pihak yang berwewenang haruslah mengacu pada visi dan misi serta tujuan yang diinginkan. Selain mengacu pada hal tersebut, kepala lembaga harus mempertimbangkan dengan matang latar belakang perumusan sebuah kebijakan, baik dari sisi efektifitas, efisiensi, dan strateginya agar kebijakan tersebut mampu dikatakan berhasil. Dalam kondisi sosio-kultural sebuah lembaga yang akan dibentuk menjadi masyarakat yang mempunyai kultur religius, maka kepala lembaga harus dapat menentukan dan memahami sebuah tahap penanaman nilai-nilai Islam pada masing-masing individu yang ada di dalamnya. Bahwasannya masyarakat dalam kondisi sosio-kultural akan mengalami 3 tahapan, yakni ekternalisasi nilai, objektivitas, dan internalisasi nilai.

Penelitian yang dilakukan oleh Rini Setyaningsih fokus pada kebijakan internalisasi nilai-nilai Islam STAIN Kudus dalam pembentukan kultur religius mahasiswa sedangkan yang peneliti lakukan ialah focus pada aspek Kebijakan pembinaan akhlak mahasiswa, adapun yang menjadi titik persamaan dalam penelitian ini ialah pada aspek kebijakan penelitian Rini Setyaningsih mengenai kebijakan internalisasi nilsi-nilai islam STAIN Kudus dan peneliti disini mengenai kebijakan pembinaan akhlak.

2. M Ghaza Kusairi Tesis (2011) telah meneliti : Model Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Lingkungan Berwawasan Iman dan Taqwa di SMA Negeri 1 Malang. Hasil penelitian ini telah menemukan bahwa kepemimpinan kepala sekolah memiliki peran yang besar untuk mengatasi krisis moral dan akhlak yang melanda peserta didik. Dalam hal ini kepemimpinan kepala sekolah untuk mengembangkan lingkungan berwawasan iman dan taqwa kepada Allah SWT sangat dibutuhkan.

Lrtak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh M Ghaza Kusairi dan penelitian ini adalah pada aspek lembaga dan tempat penelitian serta fokuspenelitian. penelitian M Ghaza Kusairi meneliti model kepemimpinnan dalam pengembangan lingkungan berwawasan iman dan taqwa sementara peneliti disini terkait dengan kebijakan pembinaan akhlak mahasiswa. Letek persamaan dalam penelitian ini ialah pada aspek pengembangan lingkungan berwawasan taqwa dan yang ada hubungannya dengan peneliti tersebut dengan penelitian ini idalah sama-sama melakukan penelitian pada lembaga pendidikan dan penelitian pada persoalan keislaman.

3. Satmawati Tesis. dengan judul, Implementasi Kebijakan Pembinaan Keagamaan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan   Klas II A Kendari) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembinaan keagamaan bagi WBP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat telah diimplementasikan oleh aparat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari yang ditunjukkan dengan adanya empat aktivitas implementasi yakni: spesifikasi tugas-tugas implementer, penyusunan rencana kerja yang mengalokasikan tugas-tugas dan standar-standar kinerja bagi unit-unit pelaksana, penyediaan pelayanan, dan pengawasan terhadap kerja implementer. Namun, implementasi kebijakan pelayanan pembinaan keagamaan bagi WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari tersebut belum sepenuhnya mengikuti proses formal dan rasional sebagaimana diasumsikan dalam model teoritis tentang proses implementasi. Faktor komunikasi yang konsisten dan jelas, sumber daya yang kurang memadai, disposisi/sikap aparat pelaksana yang belum seluruhnya konsisten, dan struktur birokrasi yang sederhana, seluruhnya mempengaruhi proses implementasi kebijakan pelayanan pembinaan keagamaan bagi WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari. Faktor komunikasi yang konsisten dan jelas dan struktur birokrasi yang sederhana mendukung proses-proses implementasi, sedangkan sumber daya yang konsisten menjadi penghambat bagi proses imeplementasi yang efektif.[[59]](#footnote-60)

Penelitian yang dilakukan Satmawati. Berkenaan dengan kebijakan pembinaan keagamaan bagi WBP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan yang menjadi kebijan ialah spesifikasi tugas-tugas implementer, penyusunan rencana kerja yang mengalokasikan tugas-tugas dan standar-standar kinerja bagi unit-unit pelaksana, penyediaan pelayanan, dan pengawasan terhadap kerja implementer. Dalam penelitian tersebut terdapat sebuah kendala dalam pembinaan keagamaan disebabkan oleh Faktor komunikasi yang konsisten dan jelas, sumber daya yang kurang memadai, disposisi/sikap aparat pelaksana yang belum seluruhnya konsisten, dan struktur birokrasi yang sederhana.

Letak persamaan dalam penelitian ini keduanya menkaji berkaitan tentang kebijakan dan pembinaan keagamaan sebagai persamaan, sedangkan letak perbedaanya penelitian yang dilakukan sukmawati dan penelitian ini pada aspek lembaga yang menjadi tempat meneliti dan jenis kebijakan.

Dari ketiga penelitian tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kebijakan dan pembinaan kegamaan merupak aspek yang penting dalam sebuah lembaga pendidikan sehingga kebijakan pembinaan akhlak Islami mahasiswa memiliki pengaruh terhadap kualitas perilaku keseharian mahasiswa. Pemkab Kolaka dilihat dalam prespektif manajemen kebijakan direktur terhadap pembinaan akhlak Islami Mahasiswa.

1. Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara.* Jakarta . Bumi Aksara. 2004. h. 2 [↑](#footnote-ref-2)
2. Heinz Weihrich and Harold Koontz, *Management A Global Perspective* Tent Edition (New York: McGraw-Hill, Inc, 1993), hlm. 123 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid, h.125 [↑](#footnote-ref-4)
4. Harold Koontz Cyrill O’Donell and Heinz Weihrich, *Management*, Eight Edition (New York: McGraw-Hill, Inc, 1993), h.144 [↑](#footnote-ref-5)
5. Noeng H Muhajir, *Metodologi Kebijakan dan Evaluasi Research*, (Yogyakarta: Rake Sarakin, 2003) h.90 [↑](#footnote-ref-6)
6. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Jakarta . Bumi Aksara. 2008: 198 [↑](#footnote-ref-7)
7. Ali Imron, 2008, *Pengertian Kebijakan*, Jakarta . Bumi Aksara . h.198 [↑](#footnote-ref-8)
8. Bell dan Stevenson, 2006, *Pengertian Kebijakan*, h:14 [↑](#footnote-ref-9)
9. Wahab, 1991, *Pengertian Kebijakan*, h:13 [↑](#footnote-ref-10)
10. Tilaar dan Nugroho, 2012, *Penegertian Kebijakan*, h:136 [↑](#footnote-ref-11)
11. Thomas dye,”Understanding Public Policy”, dalam, kebijakan public, (Jakarta:Yayasan Pancur Siwah. 2002) h. 21 [↑](#footnote-ref-12)
12. Thomas dye,”Understanding Public Policy”, dalam, kebijakan … h. 21 [↑](#footnote-ref-13)
13. UUD 1945. merupakan *hukum dasar* dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-14)
14. Mulyadi, Dedy, 2015, Studi Kebjakan Publik dan Pelayanan Publik, Penerbit Alfabeta, Bandung. h. 38-39 [↑](#footnote-ref-15)
15. Mulyadi, Dedy, 2015, Studi Kebjakan Publik ….. h. 38-39 [↑](#footnote-ref-16)
16. Dunn, William N.  *Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua.* Yogyakarta: Terjemahan Samodra Wibawa dkk. Gajah Mada University Press. 2000. h. 7-9 [↑](#footnote-ref-17)
17. Lita Khusnulailah.  Analisis kasus *Proses Penetapan Kebijakan Pendidikan Indonesia.* [*Aktivis Rawamangun Senayan*](https://gustiharyo.wordpress.com/author/gustiharyo/)*on*[31 maret 2016](https://gustiharyo.wordpress.com/2016/03/31/analisis-kasus-proses-penetapan-kebijakan-pendidikan-indonesia/)*.* h. 3-7 [↑](#footnote-ref-18)
18. Lita Khusnulailah.  Analisis kasus *Proses…..* h. 3-7 [↑](#footnote-ref-19)
19. Lita Khusnulailah.  *Analisis kasus* *Proses…..* h. 3-7 [↑](#footnote-ref-20)
20. Lita Khusnulailah.  *Analisis kasus* *Proses…..* h. 3-7 [↑](#footnote-ref-21)
21. Yoyon Bachtiar Irianto, 2011, *Empat Elemen Dalam Pembuatan Kebijakan*, h. 35 [↑](#footnote-ref-22)
22. Ferdinansyah dan Winarni E, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Utan Kayu, 2007) h.122 [↑](#footnote-ref-23)
23. Mulyasa, *Implementasi KTSP Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) h.178 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibid, h.179 [↑](#footnote-ref-25)
25. Wayne Parsons, *Publik Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan* (Jakarta: Gramedia, 2001) h.472 [↑](#footnote-ref-26)
26. Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media pressindo, 2007) h.4 [↑](#footnote-ref-27)
27. Nugroho, *R Public Policy*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), h.456 [↑](#footnote-ref-28)
28. Parsons, T, *Teori fungsional dan Implementasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: PT. Gramedia, 2003) h.5 [↑](#footnote-ref-29)
29. Charles Hoy, *Educational Adminitration: Theory, Research and Practice*, (Sixth Edition). New York: McGraw Hill,2000. H.10 [↑](#footnote-ref-30)
30. Wayne Parsons, *Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan Publik Policy,* 2001. h.230 [↑](#footnote-ref-31)
31. Repository. *Ung. Ac.id/factor-faktor yang mempengaruhi kebijakan implementasi*. h. 23 [↑](#footnote-ref-32)
32. Nasrudin Razak, *Dienul Islam*, Al Ma'arif, Bandung, 1989, h: 39 [↑](#footnote-ref-33)
33. Nasrudin Razak,  *Dienul... h*. 44 [↑](#footnote-ref-34)
34. M. Nippan, Abdul Halim, *Anak Saleh Dambaan Keluarga*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2000, h: 102. [↑](#footnote-ref-35)
35. Asnelly Ilyas, *Op. Cit*, h. 73 [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid* h: 89 [↑](#footnote-ref-37)
37. Chabib Toha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, h.121 [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid*, h. 124 [↑](#footnote-ref-39)
39. Asnelly Ilyas, *Op. Cit*, h: 80. [↑](#footnote-ref-40)
40. Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur*.Bandung:Jakarta. 2007. h. 1006 [↑](#footnote-ref-41)
41. Mohammad Nur Abdul Hafizh, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*, Mizan, Bandung, 1998, h:231. [↑](#footnote-ref-42)
42. Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur*.Bandung:Jakarta. 2007. h. 175 [↑](#footnote-ref-43)
43. Prof Umar Tirtarahardja dan Drs. S. L. La Sulo, *Pengantar Pedidikan*, 28. h. 191. [↑](#footnote-ref-44)
44. Alisakti. *Label, Komunitas Penulis Fiksi Sastra Indonesia, Filsafat Ilmu.* All Right Rserved. 2012-2017. h. 5 [↑](#footnote-ref-45)
45. Gunning. Dalam Langefald. *Aliran-Aliran Pendidikan*. Jakarta, Raneka Cipta. 1955. h. 96 [↑](#footnote-ref-46)
46. Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur*.Bandung:Jakarta. 2007. h. 154 [↑](#footnote-ref-47)
47. Dr Nasikh Ulwan. *Tarbiyah Aulad* . Hadist Bukhari (Al Kausar :Jakarta. 1998). h. 120 [↑](#footnote-ref-48)
48. Ahmad D. Marimba. Pengantar Filsafat Pendidikan Islam. Alma’arif, Bandung. Cetakan Pertama, 1962 h. 95 [↑](#footnote-ref-49)
49. Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h:326 [↑](#footnote-ref-50)
50. http://pemberdayaan-sekolah-berwawasan–imtaq.html, diakses  tanggal 7 Maret 2011 [↑](#footnote-ref-51)
51. Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah (Upaya Mengembangkan PAI dari Teori ke Aksi) (Malang: UIN Malang Press, 2010) h:116 [↑](#footnote-ref-52)
52. Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h: 147 [↑](#footnote-ref-53)
53. Asmaun Sahlan, *Op.cit*., h:129 [↑](#footnote-ref-54)
54. Muhaimin, Rekonstruksi…., *Op.cit*., h:325 [↑](#footnote-ref-55)
55. Imam Suprayogo, Pendidikan Berparadigma Al-Qur’an (Pergulatan Membangun Tradisi dan Aksi Pendidikan Islam) (Malang: UIN Malang Press, 2004), h:6 [↑](#footnote-ref-56)
56. Imam Suprayogo, Pendidikan Berparadigma Al-Qur’an (Pergulatan Membangun Tradisi dan Aksi Pendidikan Islam) (Malang: UIN Malang Press, 2004), h:6 [↑](#footnote-ref-57)
57. Islah Gusmian, Doa Mengundang Rezeki: Sukses Dalam Hidup, Berkah Dalam Usaha (Jakarta: Mizan Media Utama, 2009), h:30-31. [↑](#footnote-ref-58)
58. ### Rini Setyaningsih 2017. *Kebijakan Internalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pembentukan Kultur Religius Mahasiswa.* Jurnal p-enelitian pendidikan islam. STAIN Kudus

    [↑](#footnote-ref-59)
59. Satmawati. Tesis. *Implementasi Kebijakan Pembinaan Keagamaan* (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan   Klas II A Kendari) UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI [↑](#footnote-ref-60)